



Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan jual barang campuran, tempat kediaman di =====, Kelurahan =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada,

Hal. 1 dan 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di =====, Desa =====, Kecamatan =====,  
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2005, penggugat dengan tergugat

*Hal. 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA. Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai buti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 211/40/IX/2005 tanggal 26 September 2005.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama kurang lebih sebelas tahun.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 9 tahun dan sekarang ikut bersama penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015, antara penggugat dan tergugat sudah sering berselisih yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat yang pada akhirnya menjadi kurang harmonis.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:

*Hal. 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.TKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Penggugat sudah tidak diberikan nafkah lagi oleh tergugat.

6. Bahwa pada bulan Juli 2016, tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama Mariani, kemudian tergugat meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan lamanya.

7. Bahwa penggugat pernah mengajukan cerai gugatan pada bulan Oktober 2016, dengan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA Tkl tanggal 26 Oktober 2016, namun tidak selesai karena dicabut.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Hal. 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA. Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila gugatan penggugat dan putusan telah bekekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

10. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan

Hal. 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Tkl. tanggal 9 Februari 2017 dan 24 Februari 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

*Hal. 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA. Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 211/40/IX/2005 Tanggal 26 Septeember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Penjual Barang Campuran, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan mertua dari tergugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Hal. 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.TKl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kediaman saksi di Kelurahan ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar selama 11 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang kini dalam asuhan penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun memasuki tahun 2015 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat tapi cucu saksi sering melapor kalau bapaknya habis minum tuak (ballo) sehingga bertengkar dengan ibunya.
- Bahwa tergugat meninggalkan istri dan anak, dan tergugat semenjak tergugat menikah dengan perempuan lain pada bulan Juli 2016, sehingga

*Hal. 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA. Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat.

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Jualan Buah-buahan dan Kue, tempat kediaman di Lingkungan ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu penggugat, sedangkan Tergugat bernama =====, suami penggugat.

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Hal. 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.TK1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 25 September 2005 di Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di bulan Juli tahun 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa tergugat sering mabuk dan tidak lagi menafkahi penggugat, serta lebih memilih hidup bersama dengan istri keduanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak tergugat meninggalkan penggugat dan menikah dengan perempuan

*Hal. 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA. Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada bulan juli 2016.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak mereka berpisah setahun yang lalu.

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang .hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Hal. 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Hal. 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA. Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sering mabuk serta tidak pernah lagi menafkahi penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

*Hal. 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.TKl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 211/40/IX/2005 Tanggal 26 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P. sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

*Hal. 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA. Tkl*



sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salsani Suci Alifia binti Subir.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, sering mabuk dan tidak pernah menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat lebih memilih hidup bersama dengan istri keduanya.

*Hal. 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.TK1*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara penggugat dan tergugat sejak mereka berpisah, serta tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak, tetapi tergugat sudah tidak mau kembali kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara aquo secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga*

*Hal. 16 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA. Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hat itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai iayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang

Hal. 17 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.TKl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

*Hal. 18 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA. Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di Persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1438 **Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari **Musafirah, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis dan **Nur**

*Hal. 19 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai hakim-hakim

Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Annisa, S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

Annisa, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 15 hal, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA. Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)